

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan atau organisasi mempunyai rencana keuangan yang berbeda - beda hal ini tercermin dari laporan keuangan. Laporan keuangan berisi tentang ringkasan dari proses transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dalam periode yang bersangkutan, dan disusun dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kinerja pada perusahaan tersebut. Secara khusus laporan keuangan sektor publik (pemerintah) juga mencerminkan tentang posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh entitas (klien) sektor publik, dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas sehingga berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh entitas dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian keuangan sektor publik berfungsi untuk memonitoring dan memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan suatu keputusan (Renyowijoyo, 2010).

Pentingnya fungsi laporan keuangan maka penyusunan dan penyajiannya harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku . Khusus pada laporan keuangan publik mengacu pada SPKN. Segi lain meski terdapat acuan yang jelas namun terdapat kemungkinan terjadi resiko entitas yang dapat mempengaruhi salah saji material dalam laporan keuangan oleh karena itu perlu adanya auditor pemerintah untuk melakukan audit pada laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini auditor

pemerintah yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau sering disebut BPK, sedangkan istilah auditor didalam BPK adalah pemeriksa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Didalam BPK terdapat auditor- auditor yang berperan untuk memeriksa laporan keuangan dari beberapa lembaga- lembaga milik pemerintah.

Sebagai sebuah Instansi Pemerintah yang mengawasi keuangan lembaga pemerintahan pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pemerintah, fungsi dan tujuan BPK adalah untuk mengungkap dan menemukan terjadinya kecurangan yang terdapat di lembaga/badan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan untuk ditindak lanjuti.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu BPK sebagai salah satu institusi yang berperan dalam mencegah dan menemukan fraud harus terlebih dahulu bersih dan bebas dari tindakan fraud yang mungkin dilakukan oleh para pegawainya ([http: www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Fenomena saat ini banyak diungkapkan mengenai kasus-kasus fraud yang terjadi pada instansi pemerintah, laporan keuangan sektor publik disusun dan disajikan sebagai informasi yang menyesatkan. Ironisnya indikasi fraud baru diidentifikasi setelah beberapa waktu laporan keuangan yang sudah diaudit di publikasikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana auditor BPK dalam melakukan fungsi audit.

Sebagai studi kasus yang terjadi pada tahun 2010, Majelis hukum tipikor Jakarta memvonis 2 auditor Jabar, Enang Hermawan dan Suharto, dengan hukuman 4 tahun penjara. Terdakwa terbukti menerima uang sebesar 400 juta dari Pemkot Bekasi dengan maksud memberikan opini Wajar Tanpa Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bekasi tahun 2009. Jumlah tersebut diberikan 2 kali masing-masing 200 juta. Kedua terdakwa ini terbukti menerima suap dan telah membantu memberikan arahan pembukuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bekasi agar menjadi Wajar tanpa Pengecualian. Padahal sebelumnya opini laporan keuangan kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian. Pemberian dana 200 juta dilakukan oleh Herry Suparjan kepada Enang. Terdakwa suharto sendiri mendapat 150 juta sedangkan terdakwa Enang mendapatkan 50 juta.

Tahap kedua, diberikan oleh Kepala Inspektorat Kota Bekasi yaitu Herry Lukmantohari dan Herry Suparjan (Kabid Asset dan Akuntansi Dinas BPKD) sebesar 200 juta. Hal ini mengidentifikasi bahwa auditor BPK (pemeriksa) tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mana mestinya.

(<http://news.detik.com/berita/1383800/suap-pejabat-pemkot-bekasi-ke-bpk-jabar-terkait-hasil-audit>)

Kejadian tentang penyuapan BPK juga ditemukan di instansi-instansi lainnya sehingga penting untuk mencari upaya meningkatkan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain pengalaman, tingkat pendidikan, kesadaran etis, gender dan profil *fraud auditor*. Menurut Arles, dkk (2013), seorang auditor yang mempunyai banyak pengalaman berarti semakin banyak penugasan yang pernah ditangani olehnya. Dengan demikian semakin tinggi pengalaman kerja auditor maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab auditor dalam menemukan *fraud*.

Seorang auditor yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka akan dapat bekerja lebih baik karena dapat mengimplementasikan seluruh pengetahuan dan potensi yang kemampuannya sebagai dasar di dalam penerimaan tugas audit. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seorang auditor maka akan menunjang tanggung jawabnya dalam menemukan kecurangan pada audit laporan keuangan (Arles, dkk 2013).

Kesadaran etis adalah tindakan sadar dari seseorang untuk melakukan tindakan profesional pada saat dihadapkan pada suatu keadaan dilema etis profesinya (Rica 2010, dalam Arles, dkk 2013). Jadi semakin tinggi kesadaran etis maka akan semakin tinggi tanggung jawab auditor dalam menemukan kecurangan pada audit laporan keuangan

Menurut Robbins (2006) antara pria dan wanita berbeda pada reaksi emosional dan kemampuan membaca orang lain. Wanita menunjukkan ungkapan emosi yang lebih besar daripada pria, mereka mengalami emosi yang lebih hebat, mereka menampilkan ekspresi dari emosi baik yang positif maupun negatif, kecuali kemarahan. Wanita lebih baik dalam membaca isyarat-isyarat non verbal dibandingkan pria. Wanita lebih berhati-hati, lebih teliti dibandingkan pria, sedangkan pria lebih agresif. Jadi gender seorang auditor sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor menemukan kecurangan dalam audit laporan keuangan.

Menurut Sukanto (2007), profil *fraud auditor* tidak menunjukkan sebuah ciri-ciri khusus auditor melainkan memberi gambaran dari suatu ciri auditor. Sosok auditor yang ideal adalah seorang investigator yang handal, yang memiliki pengetahuan dan institusi dibidang penyidikan. Jadi semakin tinggi profil *fraud auditor* maka semakin meningkatnya pula tanggung jawab auditor menemukan kecurangan dalam audit laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu menggabungkan beberapa variabel independen dan menggunakan variabel kontrol. Beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian Arles, dkk (2013) adalah variabel pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesadaran etis; dari Bales and Fox (2010) dipilih variabel gender; dan dari Sukanto (2007) dipilih profil *fraud auditor*; sedangkan dari Swastyami (2015) dipilih independensi, kompetensi dan resiko audit yang dijadikan sebagai variabel kontrol.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PENGALAMAN KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN, KESADARAN ETIS, GENDER DAN PROFIL FRAUD TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERIKSA (AUDITOR) MENEMUKAN KECURANGAN DALAM SUATU AUDIT LAPORAN KEUANGAN”**.



1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dijabarkan dalam rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan?
3. Apakah kesadaran etis berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan?
4. Apakah *gender* berpengaruh terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan?
5. Apakah profil *fraud* berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif pengalaman terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan pada suatu audit laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan pada suatu audit laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif kesadaran etis terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan pada suatu audit laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *gender* terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan pada suatu audit laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif profil *fraud* terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) menemukan kecurangan pada suatu audit laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

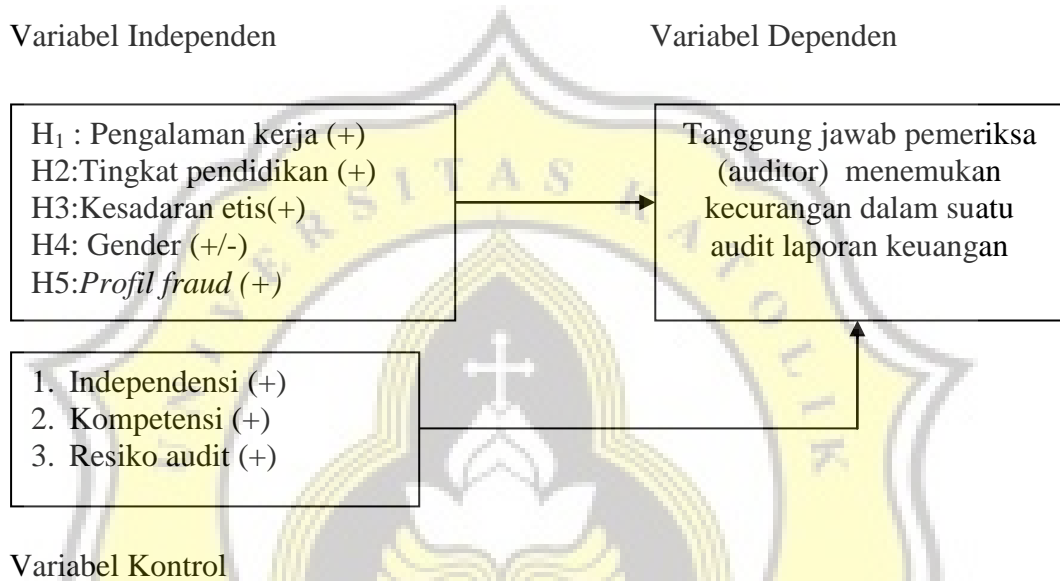
1. Manfaat teoritis

Secara teoritis memberikan bukti empiris mengenai pengaruh, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesadaran etis, *gender*, dan profil *fraud* terhadap tanggung jawab pemeriksa (auditor) dalam menemukan kecurangan pada suatu audit laporan keuangan, sehingga Ilmu Akuntansi Audit pada Sektor Publik semakin berkembang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis memberikan informasi dan referensi bagi KAP dan BPK mengenai upaya untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menemukan kecurangan pada suatu audit laporan keuangan dalam kaitannya dengan pengalaman kerja, tingkat pendidikan, *gender*, kesadaran etis dan profil *fraud*. Selain itu, memberikan informasi dan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dalam kaitannya dengan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Pikir



Gambar 1.1

Kerangka Pikir

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pemeriksa (auditor) dalam melaksanakan tanggung jawab menemukan kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesadaran etis, gender, profil *fraud*, independensi, kompetensi, dan resiko audit.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu :

- Bab I, Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini
- Bab II, Merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan penelitian ini
- Bab III, Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan pada penelitian ini, dan metode analisis data
- Bab IV, Merupakan hasil pembahasan analisis dan pengolahan data
- Bab V, Merupakan bab tentang kesimpulan dan saran